

## ABSTRAKSI

Krisis keuangan yang memicu jatuhnya rezim Soeharto pada pertengahan tahun 1998 mewariskan kepada negara hutang pemerintah yang sangat besar, yang sama besarnya dengan produk domestik bruto. Hutang ini, yang berjumlah kurang lebih US\$ 154 triliun, menuntut biaya sosial yang sangat besar dengan menyerap dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengentaskan kemiskinan. Beberapa ahli ekonomi mengkhawatirkan pada akhirnya hal tersebut akan terbukti tidak berkesinambungan, yang memaksa pemerintah masuk dalam keadaan wanprestasi yang secara politis merugikan.

Indonesia dan para kreditornya, khususnya Dana Moneter Internasional (IMF), telah menyepakati beberapa langkah kebijakan untuk mengurangi hutang pemerintah hingga ke tingkat yang terkendali. Melalui serangkaian *Letter of Intent* sejak bulan Oktober 1997, Indonesia dan IMF telah bersepakat untuk merundingkan kembali jadwal pembayaran hutang, mengurangi subsidi, meningkatkan pendapatan pajak, menjual asset-asset komersil negara, dan merestrukturisasi hutang swasta kepada negara. Indonesia juga telah berkomitmen untuk melakukan reformasi pada sistem hukum dan perbankan untuk melanjutkan pemulihan ekonomi, mengembalikan investasi swasta yang telah banyak meninggalkan negeri ini, dan mengurangi resiko terjadinya krisis keuangan berikutnya. Akan tetapi, meskipun ada konsensus antara Indonesia dan IMF tentang apa yang perlu dilakukan dan kemajuan yang berarti pada beberapa bidang, pelaksanaan unsur-unsur penting tertentu dari agenda reformasi keuangan ini di dalam negeri belum dilakukan dengan konsisten atau dengan komitmen yang diperlukan.

Kekecewaan IMF pada reformasi ekonomi yang bergerak lambat telah membuatnya menangguhkan pinjaman kepada Indonesia empat kali sejak tahun 1997. Pinjaman IMF pada saat laporan ini ditulis sedang ditangguhkan. Bank Dunia memperingatkan bahwa penyimpangan kebijakan selanjutnya akan turut berperan dalam suatu "skenario krisis" yang dapat membuat Bank Dunia menghentikan pemberian pinjaman baru. Sementara ada tanda-tanda bahwa dapat diraih kesepakatan atas beberapa perbedaan pendapat yang ada saat ini antara Indonesia dan IMF, tetapi pengalaman pada tiga tahun yang lewat menunjukkan bahwa ketegangan dapat dengan cepat timbul kembali.

Jalannya reformasi keuangan yang lambat dan tersendat-sendat sebagian dapat dikatakan sebagai akibat dari kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah manapun di tengah-tengah peralihan politik yang rumit dan harapan-harapan yang terlalu optimis dari para pemberi pinjaman luar negeri seperti IMF. Namun, reformasi juga telah mengalami distorsi dengan terpecahnya politik Indonesia sejak jatuhnya Soeharto, sistem hukum yang tidak berfungsi dan budaya politik dimana perkoncoan dan korupsi memegang peranan kunci. Masalahnya bukanlah kurangnya pilihan politik, tetapi ketidakmampuan dan keengganan pemerintah untuk sepenuhnya melaksanakan agenda kebijakan yang telah disepakatinya dengan para kreditor luar negeri. Ditambah dengan faktor sosial dan